

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PEKERJA DI
DESA WAY MENGAKU KECAMATAN BALIK BUKIT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**ABDULLAH FIKRI
NPM : 1051010043**

Jurusan : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H/2018 M**

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PEKERJA DI
DESA WAY MENGAKU KECAMATAN BALIK BUKIT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah**

Oleh

ABDULLAH FIKRI

NPM : 1051010043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, SE. M. Si.
Pembimbing II : Ridwansyah, SE. M.E. Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H/2018 M**

ABSTRAK

ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PEKERJA DI DESA WAY MENGAKU KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

ABDULLAH FIKRI

Masyarakat di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat merupakan mayoritas petani dan bergerak di bidang pertanian, disamping mengelola lahan sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan atau adat setempat. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, sehingga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat? dan Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Alat pengumpul data yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 3 macam yaitu 1) sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri, 2) sistem bagi hasil (parohan), dan 3) sistem buruh tani. Dari ketiga sistem tersebut ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang dijelaskan dalam Islam, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada relevansinya dengan sistem mukhabarah karena semua modal pengelolaan tanah dibebankan

kepada pihak penggarap. Pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan konsep Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan sighat. Hanya saja dari aspek objek akad adanya ketidaksesuaian yaitu presentase porsi bagi hasil dan jangka waktu tidak disebutkan pemilik modal dan pekerja ketika di awal akad.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI SYARIAH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Sistem
Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa
Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten
Lampung Barat**

Nama Mahasiswa : **Abdullah Fikri**

NPM : **1051010043**

Jurusan : **Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Hj. Heni Novlarita, SE. M. Si.
NIP. 196511207992032002

Pembimbing II,

Ridwansyah, SE. M. E. Sy.
NIP. 197401082011011001

Ketua Jurusan EI

Madnasir, SE. M. Si.
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”**, ditulis oleh **Abdullah Fikri, NPM. 1051010043**, Jurusan : **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017.

TIM / DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Hanif, SE. MM.**

Sekretaris : **Liya Ermawati, M.S.Ak.**

Penguji Utama : **Dr. Hj. Heni Noviarita, SE. M. Si.**

Penguji Kedua : **Femei Purnamasari, M. Si.**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh Baharudin, MA.
NIP. 195808241989031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa : 29)¹



¹Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2009) h. 53

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua ku, ayah Drs. H. Muslim Alwi, M.H.I. dan ibu Dra. Hj. Nurwati yang dengan do'a dan kasih sayang nya yang selalu mengiringi di setiap langkah hidup ku, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil sehingga aku dapat menyelesaikan perkuliahanku.
2. Buat kakakku Ahmad Taqiyuddin Absor, M. Pd. I, Zahratunnisa, M. Sy. Miftahurrizki, S.An dan Abduzzikri, S. Sos. yang selalu memotivasi, menghibur dan memberi kekuatan di setiap lelah hidupku.
3. Untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan ku untuk belajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Abdullah Fikri anak dari pasangan Ayahanda Drs. H. Muslim Alwi dan Ibunda Dra. Hj. Nurwati. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 07 November 1991.

Pendidikan pertama dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Bandar Lampung selesai tahun 2004, kemudian melanjutkan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Tanjung Karang selesai pada tahun 2007 dan dilanjutkan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Tanjung Karang selesai 2010.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 di jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan terdalam kepada semua orang yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Moh. Bahrudin, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

2. Madnasir, SE, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Heni Noviaritas, SE. M. Si. selaku pembimbing I dan Ridawansyah, SE. M. E. Sy. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga kripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, semoga skripsi mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Bandar Lampung, Januari 2018
Penulis

Abdulah Fikri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
A. BAB I PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
B. BAB II EKONOMI ISLAM DAN BAGI HASIL	
A. Ekonomi Islam	
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	13
2. Tujuan dan Peranan Ekonomi Islam.....	15
3. Sifat dan Karakter Ekonomi Islam.....	18
4. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	25
B. Bagi Hasil	
1. Pengertian Bagi Hasil	32
2. Macam-macam Bagi Hasil.....	32
3. Kelebihan dan Kekurangan Bagi Hasil.....	45
C. Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran menurut Tinjauan Ekonomi Islam	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	49
B. Populasi Penelitian	50
C. Metode Pengumpul Data	51
D. Metode Analisi Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	
1. Sejarah Berdirinya.....	55
2. Visi dan Misi	56
3. Susunan Organisasi	57
4. Keadaan Jumlah Penduduk	59
5. Keadaan Ekonomi	59
6. Keadaan Pendidikan.....	60
7. Keadaan Keagamaan	61
 B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	62
 C. Analisis Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Populasi Penelitian.....	14
Tabel 2 : Jumlah Prosentasi Obyek Penelitian.....	15
Tabel 3 : Nama-nama yang Pernah Menjabat Kepala Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	62
Tabel 4 : Keadaan Jumlah Penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Menurut Jenis Kelamin dan Umur.....	66
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menurut Mata Pencaharian.....	67
Tabel 6 : Keadaan Penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menurut Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel 7 : Keadaan Penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menurut Agama.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kerangka Observasi
- Lampiran 2 : Kerangka Interview dengan Orang Tua
- Lampiran 3 : Kerangka Interview Kepala Desa
- Lampiran 4 : Kerangka Dokumentasi
- Lampiran 5 : Daftar Responden
- Lampiran 6 : Surat Pengantar Riset
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Riset
- Lampiran 8 : Pengesahan Proposal
- Lampiran 9 : Kartu Kosultasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami arti judul skripsi “Analisis Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”, maka penulis perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Adapun beberapa kata yang perlu penulis jelaskan, yaitu :

Analisis adalah uraian atau penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan lain-lain) untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal usul, sebab musabab yang sebenarnya.²

Ekonomi Islam adalah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

²Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 132.

³Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), cet. keempat, h. 11.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁴ Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharring* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁵

Pemilik modal merupakan pihak perseorangan atau perseroan yang memiliki sejumlah dana yang menjadi dasar untuk mendirikan suatu perusahaan atau usaha dengan menggunakan dana tersebut membelanjai aktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk barang dan jasa.⁶

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁷

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153

⁵Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), Cet. ke-2, h. 537

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951

⁷*Ibid.*, h. 892

Desa Way Mengaku adalah suatu desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang terletak di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang dalam hal ini menjadi obyek penelitian.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan obyektif

Mayoritas penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat bergerak di bidang pertanian, disamping mengelola lahan sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan atau adat setempat. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan. Mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat merupakan hal urgen dan mendesak dalam sebuah penelitian.

2. Alasan subyektif

- a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada relevansinya dengan jurusan penulis yakni Ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah jurusan yang sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat khususnya peningkatan ekonominya.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana, literatur yang mendukung, data-data yang menunjang serta transportasi yang mudah dijangkau ketempat lokasi penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur sehingga mayoritas penduduknya menggantungnya mata pencahariannya pada sektor pertanian. Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (*devisa*), bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional.⁸

Islam sebagai sebuah sistem mengajarkan keseimbangan antara material dan spiritual, dunia dan akhirat, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap

⁸Soekartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2001), cet.VI, h.10.

kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari banyaknya ayat al-Qur'an, matan hadis dan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian dalam Islam bukan hanya semata-mata kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat ukhrawi spiritual. Dengan demikian, kegiatan pertanian dalam Islam harus ditujukan untuk meyakini adanya Allah SWT dan mengagungkan kebesaran-Nya.⁹

Dalam ajaran Islam, tidak diperbolehkan lupa dengan kehidupan dunia dan hanya cenderung kepada kehidupan akhirat dan hanya berdo'a saja tanpa berusaha. Kita diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing sesuai dengan kemampuan. Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al Jumuah : 10)¹⁰

⁹Jusuf Sutanto, dkk., *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 693-694.

¹⁰Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), h. 971.

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa umat Islam diperintahkan oleh Allah apabila setelah melaksanakan ibadah shalat maka bertebaranlah di muka bumi untuk melakukan berbagai macam aktivitas sesuai dengan skill, keahlian dan keterampilan termasuk di dalamnya adalah mengolah sumber daya alam berupa tanah atau lahan pertanian.

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.¹¹ Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.

Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mempunyai tenaga untuk bertani. Agar tidak ada tanah pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk

¹¹Izzudin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahari Aneska, 2002), cet.II, h. 56

memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik. Karena selain itu juga, dalam sistem bagi hasil pertanian sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama bagi hasil dengan menggunakan sistem *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam.¹²

Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam mengembangkan pertumbuhan suatu negara, sebagaimana al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. Menurutny, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.¹³

¹²*Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarapnya yang bibitnya berasal dari pemilik tanah. *Mukhabarah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarapnya yang bibitnya berasal dari petani. Sedangkan *musaqah* adalah kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola untuk memelihara dan merawat kebun dan semuanya dengan kesepakatan bagi hasil dari hasil panen yang didapatkan. Lebih jauh lihat Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet.ke-5, h. 196

¹³Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, “al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab”, dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 96.

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak jaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. *Mukhabarah* dan *muzara'ah* dengan persentase 50% : 50% adalah yang umum dipraktekan. Kerjasama bagi hasil memelihara ternak dengan cara maro (bagi hasil dengan nisbah 50% : 50% dari anak ternaknya atau dari selisih nilai jual dengan nilai pada saat ternak diserahkan kepada pemeliharannya).

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia. Dalam hukum Islam banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh mengenai tentang sistem pertanian. Sistem-sistem tersebut dikenal dengan istilah *muzra'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*. Dalam Undang-undang di Indonesia juga telah diatur tentang bagi hasil pertanian yang berlaku secara menyeluruh yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad tersebut.

Desa Way Mengaku merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah penduduk 2.217 jiwa atau 688

KK yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk. Namun, tidak semua petani mempunyai tanah pertanian sendiri, bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai tanah. Salah satu sistem pengelolaan pertanian yang dipakai oleh penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat adalah bagi hasil.

Pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak ada ketentuan presentase antara pemilik lahan dengan pekerja atau petani penggarap. Pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Padahal dalam ketentuan fiqh mu'amalatnya jelas bahwa setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan akad. Tetapi perjanjian akad yang dilakukan oleh pekerja atau penggarap pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam fiqh muamalat. Dilihat dari kebiasaan masyarakat Desa Way Mengaku dalam melakukan bagi hasil dalam sistem pertanian terdapat ketidakadilan, dimana petani penggarap mendapatkan bagian lebih besar daripada pemilik lahan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan salah satu pekerja atau penggarap lahan pertanian pada saat pra survey yaitu :

“Sebagai pekerja atau penggarap lahan pertanian, saya menyadari bahwa diawal menggarap lahan tersebut tidak membuat perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan akad dengan pemilik modal, hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”.¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui sejauhmana konsep Islam dipraktekkan dalam melakukan kerja sama di bidang pertanian dengan judul “Analisis Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat ditelusuri beberapa masalah yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, kondisi ini memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak seperti system pembagian bagi hasil yang belum tentu sama antara pemilik modal dengan pekerja.

¹⁴Syarifudin, Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, *Interview*, Mei 2017.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, hal ini dikarenakan sesuai dengan spesifikasi keahlian yang penulis miliki.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?.
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

b. Bagi petani

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep syari'ah, sehingga dapat mengembangkan sistem pertanian di masyarakat menjadi lebih baik.

c. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan secara umum mengenai perjanjian kerja sama di bidang pertanian dan sistem bagi hasil pertanian yang baik menurut konsep syari'ah.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah informasi tentang sektor pertanian, terutama dalam sistem bagi hasil yang baik sesuai konsep ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

BAB II

EKONOMI ISLAM DAN BAGI HASIL

Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam

Sebelum merumuskan tentang pengertian ekonomi Islam, terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian ekonomi secara umum.

Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki kegiatan-kegiatan manusia dalam usaha-usahanya untuk memperoleh benda-benda pemuas guna keperluan hidupnya yang diarahkan pada kemakmuran, serta segala peristiwa yang timbul sehubungan dengan usahanya tersebut.¹⁵

Ketika berbicara masalah ekonomi, maka tidak bisa terlepas dari diskursus ekonomi Islam, karena masalah ekonomi (tak terkecuali ekonomi Islam) pada saat sekarang menjadi topik yang menarik untuk dibahas, baik sebagai isu perilaku, lembaga, bidang studi ataupun dalam wujud kebijakan politik.

Ada beberapa pendekatan untuk merumuskan pengertian tentang ekonomi Islam. *Pertama*, dengan menilai pengertian ekonomi modern dengan ajaran Islam. Dengan cara ini maka ekonomi Islam didefinisikan sebagai “ilmu ekonomi dalam sorotan prinsip-prinsip Islam dengan membawa ilmu ekonomi modern dalam keselarasan dengan syari’ah (hukum-hukum Islam)”.¹⁶ Cara *kedua*, adalah

¹⁵Kartasapoetra dan Agus Rahmat, *Ilmu ekonomi umum*, (Bandung: Armico 1982), h. 2.

¹⁶AE. Priyono, dkk., *Islamisasi Ekonomi : Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: PLP2M, 1995), h. 79.

dengan mengambil definisi yang paling mutakhir dan paling sedikit dikritik yang kemudian dinilai dengan ajaran Islam.

Misalnya saja yang mengambil definisi Lord Robins sebagaimana dikutip oleh Dawam Rahardjo, bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat yang langka yang mengandung pilihan-pilihan dalam penggunaannya sesuai dengan syariah.¹⁷

Hasanuz Zaman sebagaimana dikutip oleh Dawam Rahardjo, menyusun suatu definisi ekonomi Islam dengan mengakomodasikan berbagai persyaratan yang menjadi ciri dalam hidup cara Islam. Persyaratan itu pertama-tama adalah bahwa kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah kegiatan yang dikendalikan oleh hasrat dan pengalaman manusia saja, melainkan harus pula dituntun oleh pedoman-pedoman dasar syari'ah. Kedua, sebagai cabang ilmu-ilmu sosial, maka ekonomi Islam tidak bebas dari nilai-nilai moral. Berkenaan dengan hal itu, Hasanuz Zaman berpendapat :

“Pengetahuan dan aplikasi pedoman dan aturan-aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat”.¹⁸

Berdasar definisi tersebut diperoleh gambaran bahwa ekonomi Islam adalah penerapan syari'ah dalam kehidupan ekonomi. Apabila definisi ini dipakai, maka perkembangan ilmu ekonomi Islam akan mengarah pada aplikasi

¹⁷*Ibid.*, h. 80.

¹⁸*Ibid.*, h. 80-81.

alat-alat dan model-model analisis ekonomi konvensional, khususnya yang berdasarkan asumsi ekonomi pasar, guna melaksanakan syariah Islam.

Sejalan dengan definisi tersebut di atas, Hidajat Nataatmadja mendefinisikan, bahwa ekonomi Islam adalah :

Persoalan yang mempelajari bagaimana manusia mengaktualisasikan fitrahnya sesuai dengan ajaran agama, khususnya di bidang pendayagunaan sumber daya yang langka yang memiliki berbagai alternatif pendayagunaan, dengan tujuan agar manusia mampu mengambil hikmah dan manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan kehidupan umat, tanpa melupakan kewajibannya untuk menjaga kelestarian sumber daya itu.¹⁹

Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga, yang meliputi rumah tangga perseorangan, badan usaha, organisasi, negara, bahkan rumah tangga dunia. Dengan kata lain, ekonomi Islam adalah penerapan syariah Islam dalam kehidupan ekonomi, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Tujuan dan Peranan Ekonomi Islam

Ekonomi, baik dalam arti ilmu pengetahuan maupun aplikasi dalam kehidupan manusia merupakan bagian dari pengetahuan dan aktivitas sosial, yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau bersama-sama dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran.

¹⁹Hidajat Nataatmadja, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik*, (Yogyakarta: PLP2M, 2004), h. 2.

Kemakmuran adalah keadaan seseorang untuk dapat memenuhi yang sifatnya tidak terbatas dengan sarana yang terbatas.²⁰ Jadi, dengan mempelajari masalah ekonomi, manusia diharapkan mengenal dan memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran, demikian halnya dengan ekonomi Islam.

Secara tentatif, dalam usahanya untuk merumuskan tentang hakekat ekonomi Islam, Akram Khan sebagaimana dikutip oleh Dawam Rahardja menyebutkan mengenai tujuan ekonomi Islam, yaitu :

”Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di bumi berdasarkan atas kerjasama dan partisipasi”.²¹

Konsep kunci dalam tujuan tersebut, adalah sumber-sumber di bumi yang disediakan oleh Allah secara melimpah dimana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperolehnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Fushshihat ayat 10, yaitu :

وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً ۖ لِلسَّائِلِينَ ۙ ١٠

Artinya : Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di

atasnya, Dia memberkahi-Nya dan Dia menentukan padanya kadar

makanan-makanan (penghuninya) dalam empat masa (penjelasan itu

²⁰Rusjdi Rasjidin, (Et. Al.), *Pengantar Ekonomi Modern*, (Jakarta: Yudistira, 1996), h. I8.

²¹Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 8I

sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. (QS. Fushhilat : 10).²²

Setelah memahami pendapat Akram Khan di atas, maka masalah ekonomi Islam adalah menyelidiki modal atau sumber ekonomi dan pemanfaatannya sehingga menghantarkan manusia kepada kesejahteraan material dan spiritual. Titik tolak pendekatan Islam mengenai tujuan ini adalah bukan kelangkaan sumber-sumber, melainkan justru kecukupan untuk bisa mencapai kesejahteraan manusia. Dengan demikian, menurut Yusuf Qardhawi :

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan Ketuhanan. Ia terpancar dari akidah Ketuhanan, akidah tauhid. Akidah yang dengan sengaja diturunkan Allah pada Rosul-Nya untuk manusia. Ekonomi Islam bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia juga untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan yang bisa mengkafirkan dan kelaparan yang bisa mendatangkan dosa.²³

Berdasar uraian mengenai tujuan dan peran ekonomi di atas dapat kita pahami bahwa kesejahteraan baik ditinjau dari segi material maupun segi spritual merupakan tujuan dari suatu kegiatan ekonomi tak terkecuali ekonomi Islam. Dengan kata lain masyarakat (umat) dapat dikatakan makmur apabila dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan sebaik-

²²Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), h. 774.

²³Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 35-36.

**baiknya, dan disinilah ekonomi Islam mempunyai peran untuk
mewujudkannya.**

Tingkat kemakmuran suatu masyarakat (umat) dapat diukur dengan seberapa banyak benda dan jasa atau sumber-sumber yang dihasilkan serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah, baik itu kebutuhan materil maupun kebutuhan spritual. Berkenaan dengan itu, ekonomi Islam harus dapat mengambil peran yang lebih banyak lagi, karena menurut Yusuf Qardawi :

”Sesungguhnya jika kebutuhan pribadi dan keluarganya mencukupi, seseorang akan hidup tentram dan bisa beribadah dengan khusuk kepada Tuhannya yang memberinya makan tak kala ia lapar dan menentramkan jiwanya tak kala ia takut“.²⁴

Jelaslah bahwa kemakmuran yang ingin dicapai melalui kegiatan/aktifitas ekonomi Islam adalah kemakmuran dalam arti menyeluruh, tidak hanya kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan spritual.

Sifat dan Karakter Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mengenal empat sendi utama, yaitu Ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan.²⁵ Keempat sendi tersebut merupakan sifat dan ciri khas/karakter ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik

²⁴*Ibid.*, h. 86.

²⁵Yusuf Qardawi, *Norma dan Akhlak dalam Perekonomian dan Muamalat Islami*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 30.

bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami. Setiap norma ini mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, maupun aspek-aspek lainnya.

Berdasarkan sendi Ketuhanan, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Aktivitas ekonomi seperti : produksi, distribusi, konsumsi dan lain-lain tidak lepas dari titik tolak ke-Tuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Hal ini nampak dalam firman Allah surat al Mulk ayat 15, yaitu :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَلَمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah dibangkitkan”. (QS. Al Mulk : 15).²⁶

Ayat di atas mempertegas bahwa segala fasilitas yang ada di bumi ini semua diperuntukkan kepada manusia agar dikelola dengan baik untuk mendapatkan rizki yang bermanfaat, tapi ingat di dalam menggapai rizki (keuntungan) harus bertujuan akhir kepada Allah.

Hal lain yang terlihat jelas dalam ekonomi yang menganut paham Ketuhanan ialah perasaan selalu ada yang mengawasi. Sikap ini muncul dari keimanan seseorang kepada Tuhannya. Dengan perasaan seperti itu, seorang

²⁶Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 956.

muslim tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya dan tidak akan memakan harta yang bukan haknya. Contohnya, ketika dunia dilanda krisis sandang, pangan, dan papan, seorang pengusaha muslim yang merasa selalu ada yang mengawasi tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 188 yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui“.* (QS. Al Baqarah : 188) ²⁷

Berdasar ayat di atas, betapa perlunya keimanan untuk mengarahkan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan Islam. Dan dari norma Ketuhanan inilah, dalam ekonomi Islam muncul istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah. Adanya norma istikhlaf ini makin mengukuhkan norma Ketuhanan dalam ekonomi Islam.

Karakter ekonomi Islam yang kedua adalah bahwa, sistem ekonomi Islam berlandaskan etika. Dalam kaitannya dengan karakter ini, Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan

²⁷ Ibid., h. 46.

untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa terkendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam. Misalnya, al Quran mewajibkan umat Islam meninggalkan aktivitas bisnisnya dengan bersegera mengingat Allah jika mereka mendengar azan pada hari Jum'at, sebagaimana dijelaskan dalam al Quran surat al Jumuah ayat 9 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya“. (QS. Al Jumuah : 9).²⁸

Al-Qur'an juga mengancam orang-orang yang sibuk dengan bisnisnya sehingga meninggalkan shalat Jum'at, hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS.

Al-Jumuah ayat 11, yang berbunyi :

²⁸Ibid., h. 933.

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۖ أَلَمْ يَأْمُرْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

مِّنَ اللَّهِ وَ مِنَ التَّجَرَّةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّاٰزِقِينَ ۙ ۱۱

Artinya : “Dan apabila melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepada-Nya dan mereka tonggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah : “ Apabila yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan “ dan Allah sebaik-baik pemberi rizki”. (QS. Al Jumuah : 11).²⁹

Kedua ayat di atas jelas bahwa apabila telah mendengar adzan khususnya adzan pada hari jumat untuk segera meninggalkan segala macam aktivitas duniawi yaitu jual beli dan bersegera untuk mengingat Allah, hal tersebut dimaksudkan agar segala aktivitas yang dikerjakan senantiasa mendapat keberkahan hidup.

Para pakar ekonomi non muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam. Menurut mereka, Islam telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi. Hal seperti ini dikemukakan oleh Jack Austri, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi, bahwa :

“Islam adalah gabungan antara tatanan kehidupan praktis dan sumber etika yang mulia. Antara keduanya terdapat ikatan sangat erat yang tidak terpisahkan. Dari sini bisa dikatakan bahwa orang-orang Islam tidak akan

²⁹Ibid., h. 934.

menerima ekonomi kapitalis. Dan ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan etika“.³⁰

Selanjutnya, selain bercirikan ke-Tuhanan dan bermoral, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa kemanusiaan bertolak belakang dengan Ketuhanan sehingga keduanya tidak mungkin digabungkan. Dugaan tersebut tidak benar. Setidaknya, mereka yang menduga seperti itu lupa bahwa ide kemanusiaan berasal dari Allah. Dengan kata lain, substansi kemanusiaan berasal dari Ketuhanan. Allah yang memuliakan manusia dan menjadikannya khalifah di bumi. Tujuan ke-Tuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia. Sebab, setiap manusia dilahirkan dengan fitrah ke-Tuhanan.

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera“.³¹ Yang dimaksud dengan manusia di sini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan pada nash al Quran dan as Sunnah (yang berarti nash Ketuhanan) maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusialah yang

³⁰Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 55.

³¹*Ibid.*, h. 57.

memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikan dalam praktek.

Berangkat dari aspirasi uraian di atas, manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Berkat izin Allah, manusia bisa bekerja. Manusia yang menjadi wakil Allah di bumi, sebagaimana firman Allah yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

Artinya : *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat :
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi ini...”*. (QS. Al Baqarah : 30).³²

Konsep ekonomi Islam menjelaskan bahwa manusia dan faktor-faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam.

Karakteristik ekonomi Islam berikutnya adalah bahwa ekonomi Islam bersifat pertengahan (keseimbangan). Dalam kaitanya dengan karakter ini. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan adil. Dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan segala segi imbang, antara modal dan usaha, antara

³²Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. I3.

produksi dan konsumsi, antara produsen dan perantara dan konsumen, dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi, karakter/norma menengah yang paling menonjol dalam lapangan perekonomian terletak pada dua sendi, yaitu :

1. Pemahaman Islam tentang kedudukan harta. Islam adalah agama tengah-tengah antara agama aliran dan filsafat yang menerangi segala bentuk kehidupan dunia yang baik-baik dengan aliran materialistik yang menjadikan harta sebagai Tuhan yang disembah dan bahwa kehidupan ini hanya untuk dunia (hedonisme).
2. Pemahaman Islam tentang hak individu. Islam berdiri di antara kelompok yang mengakui hak individu, sehingga seseorang menganggap harta itu hak miliknya secara mutlak, dan kelompok yang memerangi hak tersebut. Kelompok yang terakhir ini menganggap pemilikan harta secara individu adalah sumber kejahatan dan penindasan dalam masyarakat sehingga mereka berusaha menghapuskan dengan sekuat tenaga.³³

Uraian di atas menegaskan bahwa Islam dalam kaitannya dengan perekonomian mempunyai sikap moderat dalam memandang hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Disisi lain Islam sangat moderat dalam memandang harta, yaitu berdiri antara monastisisme dan materialisme.

Jelaslah bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bercirikan Ketuhanan, berlandaskan etika, bercirikan kemanusiaan, dan bersifat pertengahan (seimbang), sebagaimana diuraikan dalam pembahasan di atas.

Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

³³Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 71-72.

Ekonomi Islam sebagai landasan hukum bagi pelaku ekonomi, memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu :

a. Kepemilikan

Pada hakikatnya kekayaan adalah milik Allah semata. Allah SWT telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dikelola untuk kepentingan manusia.³⁴ Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat an Nisa ayat 6 :

... فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : "... Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....".

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walaupun begitu Islam memberikan batasan tertentu agar tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Sebab esensinya mereka hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Dengan kata lain, harta itu merupakan titipan Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam masalah kepemilikan harta, disamping ada kepemilikan individu ada juga yang disebut kepemilikan umum.

b. Sistem ekonomi berlandaskan etika

³⁴Abul A'la Al Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (Bandung: Al Maarif, Bandung, 1984), Penerjemah Abdullah Suhaili, h. 116.

Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlaq, politik dengan etika, perang dengan etika dan sebagainya. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membebahi akhlaq manusia. Manusia muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi yang lain terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

c. Menjunjung tinggi rasa kemanusiaan

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat dan seluruh ummat manusia.

Dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam al Quran dan Hadits serta tertulis dalam kitab-kitab fiqih yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, tolong menolong dan menjauhi sikap iri, dengki dan dendam.

d. Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan harta atau kekayaan pada individu atau kelompok tertentu, dan dianjurkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Islam juga melarang individu untuk mengumpulkan harta secara berlebihan.³⁵ Allah berfirman dalam surat at Taubah ayat 34, yaitu :

... وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

الْأِيمِ ٣٤

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih”. (At Taubah : 34)

e. Larangan terhadap praktek anti sosial

Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya praktek perjudian, penipuan dan riba. Terkait dengan masalah riba, mengingat betapa besar bahaya dari perbuatan tersebut, akan diuraikan sedikit tentang masalah tersebut.

Riba menurut bahasa berarti “*al-ziadah*” (الزيادة) yang berarti

tambahan uang pada suatu yang khusus.³⁶ Tambahan yang dimaksud disini adalah tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit ataupun banyak.

³⁵*Ibid.*, h. 118.

³⁶Ahmad Sukarja, *Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan*, (Jakarta: LSIK, 1995), h. 17.

Adapun menurut istilah, riba adalah imbalan yang diisyaratkan kepada salah satu diantara kreditor dan debitur yang melakukan mu'amalah hutang piutang atau tukar menukar suatu barang.³⁷

Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal yang dilakukan oleh debitur (pemberi hutang) kepada kreditur (yang melakukan hutang).

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina oleh karena itu riba harus dikikis habis, sebab riba itu berpangkal dari kejahatan musyrik, kehidupan hidup nafsi-nafsi, asal diri beruntung biar orang lain melarat, dengan ini ditegaskan bahwa barokah riba tidak ada. Itulah kekayaan membawa sial, membawa dendam dan kebencian.

Riba adalah salah satu perilaku yang tidak baik secara perlahan tapi pasti mengikis habis sifat kepedulian sesama manusia. Akibat perbuatan riba akan menjadi anggota masyarakat yang rusak, tidak mempunyai pekerjaan yang menentukan tidak bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Selama praktek riba banyak dilakukan orang, bertebarlah anggota-anggota masyarakat seluruhnya akibat dari pekerjaan riba.

Sebagai upaya untuk mengikis habis budaya riba ini, Islam memberikan konsep yang elegan dan tidak merugikan berbagai pihak, yaitu :

1). *Al musyakarah*

Al Musyakarah adalah merupakan salah satu pembiayaan niaga dalam bentuk kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menanamkan modalnya untuk menjalankan aktivitas tertentu.³⁸

³⁷ *Ibid.*, h. 18.

Apabila terdapat keuntungan maka besarnya pendapatan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, juga dapat di bagi berdasarkan porsi besarnya modal masing-masing. Disisi lain bila mengalami kerugian maka di tanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya kerugian, maka ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan besarnya modal masing-masing. Investasi berdasarkan konsep musyarakah diatur dalam Al Qur'an yaitu :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتَكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^طوَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَلَسَّنَا فَرْسَهُ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا ^طوَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh*”. (QS. Shaad : 24)³⁹

2). Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁰

Secara teknik, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediaakn seluruh (100 %

³⁸Karnaen Perwata Atmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002), h. 24.

³⁹Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 735.

⁴⁰Euis Amalia, *Prinsip Dasar Investasi Syari'ah dan Berbagai Produk yang Dikembangkan*, (Jakarta: P3EI, UIN Syaraif Hidayatullah, 2002), h. 9.

modal) sedangkan pihak lainya menjadi pengelola . Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalamkontek, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau atas kerugianm tersebut. kelalaian sipengelola maka ia harus bertanggungjawab.⁴¹

f. Perbedaan ekonomi dalam batas wajar

Ketidaksamaan ekonomi Islam dalam batas yang wajar, Islam mengakuinya, namun tidak membiarkannya bertambah luas. Islam selalu berusaha menjadikan perbedaan tersebut dalam batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

g. Jalan yang halal dalam mencari kekayaan

Islam tidak membenarkan bagi ummatnya untuk mencari kekayaan semau mereka, dengan jalan apa saja yang dikehendaki. Islam memberikan perbedaan kepada ummatnya cara-cara yang sah dan yang tidak sah untuk mencari penghidupan, karena mengingat akan kemaslahatan masyarakat. Semua jalan untuk mencarai kekayaan, dimana seseorang tidak dapat memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain, tidaklah sah. Kebalikannya semua

⁴¹Abul A'la Al Maududi, *Op. Cit.*, h. 119.

jalan dimana individu-individu saling memberi keuntungan antara sesama mereka dengan jalan suka sama suka dan adil adalah sah.⁴²

Berdasar uraian tentang konsep ekonomi Islam di atas, apabila dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional (Barat) sangat berbeda jauh, dimana konsep-konsep tentang ekonomi yang dikembangkan oleh Islam selalu memihak kaum dhuafa (orang-orang lemah) dan tidak merugikan berbagai pihak yang terlibat, sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional tidak memiliki kriteria di atas.

Bagi Hasil

Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah "suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak".⁴³

Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, *al Musyarokah*, *al Mudharabah*, *al*

⁴²*Ibid.*, h. 121.

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 1013.

muzara'ah, dan *al musaqolah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.⁴⁴

Macam-macam Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. *Musyarakah*

Pengertian *musyarakah*

Menurut Antonio *musyarakah* adalah akad bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa proporsi keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan hukum *musyarakah*

Landasan hukum *musyarakah* adalah :

⁴⁴Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011), h. 1

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya : ... “maka mereka berserikat pada sepertiga...”. (an-Nisa : 12)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, “sesungguhnya Allah Azza Wajala berfirman, ‘aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (HR. Abu Dawud)⁴⁵

Rukun dan syarat *musyarakah*

Rukun dari pelaksanaan *musyarakah* adalah :

- a) Pelaku akad yaitu para mitra usaha
- b) Objek akad yaitu modal, pekerja, dan keuntungan
- c) Shighah yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat pokok *musyarakah* antara lain :

- a) Syarat akad terdiri dari syarat berlakunya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad (*shihah*), syarat terealisasikannya akad (*nafadz*), dan syarat lazim.
- b) Pembagian proporsi keuntungan
 - 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan akad tidak sah menurut syariah.

⁴⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Al Maktabah Ilmiyah, t.th), juz tsani, h. 90-92.

- 2) Rasio atau nisbah keuntungan masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.

c) Penentuan proporsi keuntungan

- 1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- 3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan didapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.

d) Pembagian kerugian

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seseorang mitra menyertakan 40 % modal, maka dia harus menanggung 40 % kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian akad musyarakah tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad,

porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra.

e) Sifat modal

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.

f) Manajemen *musyarakah*

Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*.

g) Penghentian *musyarakah*

- 1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.
- 2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.

3) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

h) Penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha

Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap menjalankan usaha dapat membeli saham atau bagian dari mitra yang ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari *musyarakah* tidak berarti bahwa mitra lain juga berhenti dan tidak melanjutkan akad yang telah disepakati.⁴⁶

1) Jenis-jenis al-*Musyarakah*

a) *Syirkah al-‘inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil,

⁴⁶Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 52-60.

tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Para ulama sepakat membolehkan bentuk syirkah ini.

b) Syirkah muwafadhah

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan utang dibagi oleh masing-masing pihak. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

c) Syirkah a'maal

Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan bentuk syirkah

ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan syirkah modal dan tidak boleh syirkah kerja.

d) *Syirkah wujuh*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal secara kredit berdasar kepada jaminan tersebut. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

b. *Al-Mudharabah*

1) Pengertian *al-mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti *memukul* atau berjalan. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadikan pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2) Landasan syariah

Landasan hukum pelaksanaan *al-mudharabah* adalah :

.... فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : ...” dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mmencari

sebagian karunia Allah SWT...”. (QS. al-Muzammil : 20)⁴⁷

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَ اخْلَا
طُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda,
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli
secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan bukan untuk dijual”.
(HR Ibnu Majah)⁴⁸

3) Syarat *mudharabah*

Modalnya adalah :

- Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya
- Modal harus bentuk tunai
- Moda harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinannya melakukan usaha.

Keuntungannya adalah :

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 90-92.

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2011), h.

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentasi dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti sesuai dengan kesepakatan akad.
- b) Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudhorib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *rab al maal*.⁴⁹

4) Jenis-jenis *al-mudharabah*

a) *Mudharabah al-mutlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudhorobah muqayyadah*

Adalah kebalikan dari *mudharabah al-mutlaqah*. Si *Mudharib* dibatasi dengan batasan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁵⁰

c. *Al-Muzaraah*

⁴⁹Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 17.

⁵⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 93-97.

1) Pengertian

Al-Muzaraah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen.

2) Landasan syariah

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaroah dengan rasio bagi hasil. Maka Rasulullah bersabda, “*Hamba Allah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”.⁵¹

3) Rukun dan syarat

Hanafiah berpendapat bahwasannya rukun *muzaraah* ada 4 yaitu sebagai berikut :

- a) Tanah
- b) Perbuatan pekerja
- c) Modal
- d) Alat-alat untuk menanam⁵²

⁵¹*Ibid.*, h. 99.

⁵²*Ibid.*, h. 116

Sedangkan syarat sahnya pelaksanaan akad *muzaraah* adalah sebagai berikut :

- a) Berakal
- b) Adanya penentuan oleh kedua pihak yang akan ditanam oleh kedua pihak
- c) Pembagian hasil panen berdasarkan presetase yang sesuai dengan akad yang telah disepakati
- d) Tanah yang akan digunakan bisa ditanami dan dapat diketahui dengan jelas batas-batasnya.
- e) Penentuan waktu⁵³

4) Macam-macam *muzaraah*

- a) Tanah dan bibit berasal dari satu pihak sedangkan pihak lainnya menyediakan alat juga melakukan pekerjaan. Pada jenis ini hukumnya diperbolehkan.
- b) Tanah disediakan satu pihak, sedangkan alat, bibit, dan pekerjaannya disediakan oleh pihak lain. Hukumnya diperbolehkan.
- c) Tanah, alat, dan bibit disediakan pemilik, sedang tenaga dari pihak penggarap. Hukumnya juga diperbolehkan.
- d) Tanah dan alat disediakan oleh pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Pada bentuk yang keempat ini, *muzaraah* menjadi fasid, karena misal akad yang dilakukan sebagai menyewa tanah maka alat dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, ini disebabkan alat tidak mungkin mengikuti kepada tanah karena ada bedanya manfaat. Sebaliknya jika akad yang terjadi

⁵³*Ibid.*

menyewa tenaga penggarap maka bibit harus berasal dari penggarap yang mana akan menyebabkan ijarah menjadi fasid, ini disebabkan bibit tidak mengikuti penggarap melainkan kepada pemilik.

5) Aplikasi dalam perbankan

Pada LKS, *muzaraah* dimaksudkan untuk membantu mengembangkan sektor pertanian dimana satu pihak menyediakan lahan serta pihak lainnya yang melakukan penggarapan. Dengan begini, diharapkan bukan hanya sekedar mengembangkan sektor pertanian tapi juga untuk memanfaatkan suatu lahan agar dapat menghasilkan sesuatu serta memberikan pekerjaan terhadap orang lain.

Disamping itu dalam praktik perbankan syariah, sistem muzaraah ini jarang sekali digunakan. Karena dari sudut pandang perbankan sendiri sektor pertanian kurang menarik untuk berinvestasi. Paling hanya UMKM serta usaha kecil lainnya yang berkaitan dengan pertanian yang menggunakannya.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan dapat memberikan produk pembiayaan kepada nasabah yang bergerak pada bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil panen.⁵⁴

e. Al-Musaqah

1) Pengertian

⁵⁴Himawan Y.W, <http://himawayanuw.blogspot.co.id>, *Pengertian-Muzaraah-Dilihat-Dari-Seg.* diakses Juli 2017.

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen yang diperoleh.

2) Landasan syariah

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan tanah dan tanaman kurma dikhoibar kepada Yahudi Khoibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka sebagai imbalan, mereka memperoleh presentase tertentu dari hasil panen.

3) Rukun

Rukun dari *musaqah* adalah :

- a) Dua orang yang akad
- b) Objek *musaqah*
- c) Buah
- d) Pekerjaan
- e) Shighah⁵⁵

Sedangkan syarat-syarat dalam pelaksanaan *musaqah* adalah sebagai berikut :

- a) Ahli dalam akad
- b) Menjelaskan bagian penggarap
- c) Membebaskan pemilik dari pohon, dengan artian bagian yang akan dimiliki dari hasil panen merupakan hasil bersama.
- d) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang telah melangsungkan akad.
- e) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir sesuai dengan kesepakatan akad.⁵⁶

⁵⁵Muhammad, *Op. Cit.*, h. 57.

⁵⁶*Ibid.*, h. 58

Kelebihan dan Kekurangan Bagi Hasil

Kelebihan melakukan kerjasama bagi hasil dari sudut pandang investor atau bagi pemilik modal adalah, pengelolaan usaha dilakukan seutuhnya oleh pengelola usaha, dan pemilik modal hanya sebagai pengawas dan melakukan pembinaan tanpa terjun langsung. Hal ini sudah pasti menjadi kelebihan bagi pemilik modal, karena pemilik modal tanpa harus bekerja akan mendapatkan *passive income*.

Pada sisi lain, kami menilai bukan sebagai kekurangan namun merupakan karakter dari Perjanjian Kerja sama Bagi Hasil. Yaitu maju mundurnya usaha tersebut sangat bergantung pada iktikad baik dan keahlian dari Pengelola Usaha. Hal ini karena seluruh kendali dan supervisi pekerjaan berada di bawah pengelola usaha. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik modal untuk dapat mengetahui karakter, latar belakang pengelola usaha, dan juga bisnis yang akan dijalankan.

Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Islam menjadikan ibadah yang memiliki aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan untuk penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran. Salah satu aspek itu adalah ekonomi.

Sejumlah pendirian Islam tentang kemiskinan sebagai akibat dari pengangguran, seperti diungkapkan oleh Malik Fadjar dengan mengutip pandangan

Yusuf Qardawi dalam kitab atau buku “Perang Sopan Melawan Kemiskinan”, antara lain adalah:

- a) Islam menentang anggapan bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian jiwa, yang karenanya mesti dipelihara.
- b) Islam menolak pandangan bahwa kemiskinan adalah keadaan yang mesti diterima apa adanya dengan sebab takdir Ilahi yang sehingga tidak dapat dihindari.
- c) Islam belum memandang cukup hanya untuk menganjurkan hartawan untuk menyantuni kaum papa.
- d) Islam tidak sependirian dengan kaum kapitalis yang menganggap kemiskinan adalah suatu dosa, sedang kaum papa adalah memikul tunggalnya.
- e) Islam tidak memilih cara kekerasan untuk membela nasib kaum miskin sebagaimana dianjurkan kaum komunis dan nasionalis.⁵⁷

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, maka ekonomi Islam dapat mengambil peran dan usaha dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, baik melalui bagian produksi, konsumsi maupun distribusi. Oleh karena sasaran yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam adalah kemakmuran dalam arti luas, tidak hanya kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual, maka dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran menurut landasan ekonomi Islam, dapat ditempuh hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Peningkatan iman, agar kegiatan ekonomi masyarakat miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tetap dalam kendali iman, yaitu dengan cara: menambah tebalnya iman dengan bentuk memberi nasehat melalui ayat-ayat, hadits dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan iman, serta menjaga agar iman

⁵⁷Malik Fadjar, *Kemiskinan Dalam Perspektif Islam, dalam Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI, 1998), h. 225-226.

itu senantiasa cemerlang dan cara mengambil nasehat-nasehat yang menimbulkan khouf (rasa takut) menjalankan maksiat.

2. Eksploitasi sepihak ditiadakan, setelah mental (Iman sebagai fondasi utama dalam pengentasan kemiskinan), maka kemiskinan lebih banyak tumbuh di sebabkan oleh adanya eksploitasi itu, pemerintah yang bersih dan jujur lah yang dapat menjadi mediator pihak eksploir dan masyarakat miskin.
3. Pembekalan praktek usaha, dalam hal ini langkah yang harus di tempuh pertama kali memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat memerlukan pemenuhan. Baru setelah mengetahui kebutuhan masyarakat yang ada, tahap selanjutnya di siapkan tenaga lapangan yang bertindak sebagai motivator untuk membimbing masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti program pendampingan bagi desa miskin atau dapat juga dengan mengadakan BMT yang dilaksanakan dengan penuh kejujuran.⁵⁸

Kemudian, Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa salah satu langkah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan penganguran ditinjau dari ekonomi Islam adalah melalui pengefektifan kegiatan distribusi melalui pendayagunaan zakat. Dalam

⁵⁸Tantowi Jauhari, *Dakwah dan Persoalan Kemiskinan*, (Bandar Lampung: Mufida, 1998), h. 10

kaitan ini ia sangat berminat dan bersungguh-sungguh menggugah semangat kaum muslimin untuk mengefektifkan zakat.⁵⁹

Selanjutnya, A. Mukti Ali ketika menjadi anggota DPA, beliau melakukan kerja lapangan untuk mengamati penerapan syariat zakat di sebuah desa di Jawa Timur pada tahun 1979. Di desa Puntukrejo, di mana penduduknya penganut Islam aktif, zakat telah dapat di mobilisasi untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan modal usaha, zakat telah memerangi kemiskinan. Dalam rentang waktu 6 tahun usaha-usaha yang dikembangkan dengan sistem zakat bisa mengurangi jumlah penduduk miskin secara relatif sebanyak 24 keluarga setiap tahunnya. Dengan zakat itu pula di bangun yayasan yang bergerak dalam usaha membantu peningkatan sosial ekonomi dan pendidikan golongan miskin.

60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁵⁹Malik Fadjar, *Op .Cit.*, h. 226

⁶⁰A. Mukti Ali, Islam dan Problematika Kemiskinan, *Majalah Pesantren*, No. 2/Vol. III, 1986, h. 231

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁶¹

Sedangkan sifat penelitian dari penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁶²

Menurut Jalaludin Rahmat penelitian *deskriptif kualitatif* tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Penelitian *deskriptif kualitatif* bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan atau evaluasi
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.⁶³

⁶¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 2006), Cet. Ke v, h. 32.

⁶²Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. vi, h. 29.

⁶³Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004), edisi revisi keempat, h. 34-35.

H. Populasi Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian.⁶⁴

Populasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah seluruh individu baik itu merupakan orang dewasa, siswa atau anak-anak dan objek lain sebagai sasaran penelitian tertentu.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja penggarap lahan pertanian pada dusun I-IV di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berjumlah 21 orang.

Mengingat jumlah subyek penelitian kurang dari 100 orang, maka dalam menentukan besarnya sampel yang diambil dari suatu populasi, penulis berdasarkan pendapat yang menyatakan “bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya bersifat penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih”.⁶⁵

Kaitannya dengan penelitian ini penulis menentukan 21 orang sebagai obyek dalam penelitian ini. Mereka ini yang betul-betul mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

⁶⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cetakan keenam, h. 80.

⁶⁵*Ibid.*, h. 120.

I. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah “pengamatan atau pencatatan dengan sistematis mengenai gejala-gejala yang di teliti”.⁶⁶

Menurut Suharsimi Arikunto metode observasi adalah “suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala psikis yang serba kompleks dan dalam pola-pola kultural tertentu dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.⁶⁷

Ada dua jenis observasi yang biasa digunakan oleh para peneliti yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.
- b. Observasi non partisipan adalah suatu proses dimana observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.⁶⁸

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan yaitu peneliti turun langsung kepada objek penelitian yaitu para pekerja atau penggarap lahan pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

⁶⁶*Ibid*, h. 136.

⁶⁷H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002)., h. 85

⁶⁸*Ibid*., h. 161.

Metode ini digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

2. Metode Interview

Metode interview adalah “proses tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan”.⁶⁹

Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview dapat dibagi atas tiga macam yaitu :

- a. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti.
- b. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan interviewer.
- c. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.⁷⁰

Dalam penelitian ini interview yang digunakan ialah interview bebas terpimpin yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan yang akan di sajikan kepada interviewer.⁷¹

Penulis menggunakan metode ini karena penulis mengharapkan data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga

⁶⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet. Ke-2, h. 83.

⁷⁰*Ibid.*, h. 85.

⁷¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1996), h.192.

kebenarannya tidak akan diragukan lagi. Dalam hal ini penulis mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan juga yang di interview tidak merasa lelah diambil datanya.

Metode ini sebagai metode pelengkap untuk membuktikan data yang diperoleh dari observasi dan juga untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari dokumentasi mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya”⁷²

Jadi metode dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu instansi atau organisasi-organisasi tertentu.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang keadaan objektif Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, susunan organisasi, dan lain-lain.

⁷²Suharsimi Arikunto. *Op. Cit.*, h. 202.

J. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong, analisis data adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.⁷³

Miles and Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.⁷⁴ Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dengan proses penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data berupa kata-kata, fenomena, sikap, yang diperoleh dengan teknik yang ditentukan misalnya dengan wawancara dan dokumentasi.
2. Tahap reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyediaan transformasi data kasar yang muncul dari tahap pengumpulan data. Kegiatan reduksi data menjadi penting karena bersangkutan dengan memilah dan memilih data mana dan data dari siapa yang harus dipertajam, data mana yang harus disingkirkan karena tidak relevan dengan tema penelitian.
3. Display data atau penyajian data berarti sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.⁷⁵

⁷³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 248.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 91

⁷⁵*Ibid.*, h. 151.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Sejarah Berdirinya

Desa Way Mengaku merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Asal mula berdirinya desa tersebut adalah berawal dari adanya pendatang pada tahun 1965, mereka kemudian membuka hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, kemudian membuat rumah tempat tinggal dan menetap hingga sampai ke anak cucunya sekarang ini.

Pada awalnya Desa Way Mengaku Balik Bukit masih berupa pedukuhan yang dipimpin oleh kepala pedukuhan. Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman jumlah penduduk desa Desa Way Mengaku semakin bertambah banyak sehingga menjadi desa definitive yaitu Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.⁷⁶

Sejak berdirinya Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini sudah mengalami delapan kali pergantian Kepala Desa, adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin adalah :

⁷⁶Hadi Susanto, Kepala Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, *Interview*, Juli 2017.

Tabel 3
Nama-nama yang Pernah Menjabat Kepala Desa Way Mengaku
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

No	Nama	Tahun
1	Abdul Kadir	tahun 1965 – 1974
2	Astamo	tahun 1974 - 1980
3	Ahd. Syakrani	tahun 1980 - 1986
4	Sahrul Kasto	tahun 1986 - 1994
5	Karijoyo	tahun 1994 - 2000
6	Mawardi	tahun 2000- 2010
7	Budiyanto	Tahun 2010-2015
8	Hadi Susanto, M.Si	tahun 2015 - sekarang

Sumber : *Dokumentasi Desa Desa Way Mengaku Tahun 2017*

Visi dan Misi

Visi Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yaitu “terwujudnya masyarakat gedung Desa Way Mengaku yang mandiri, demokratis dan handal dalam sdm serta menjadi pusat keunggulan pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pembangunan di era pemerintahan global”.

Sedangkan misi Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat adalah :

- a. Meningkatkan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian.
- b. Memberdayakan potensi agroklimat secara optimal

- c. Meningkatkan sumberdaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Meningkatkan etos kerja
- e. Mendorong kemandirian kondisi kamtibmas.⁷⁷

Susunan Pemerintahan

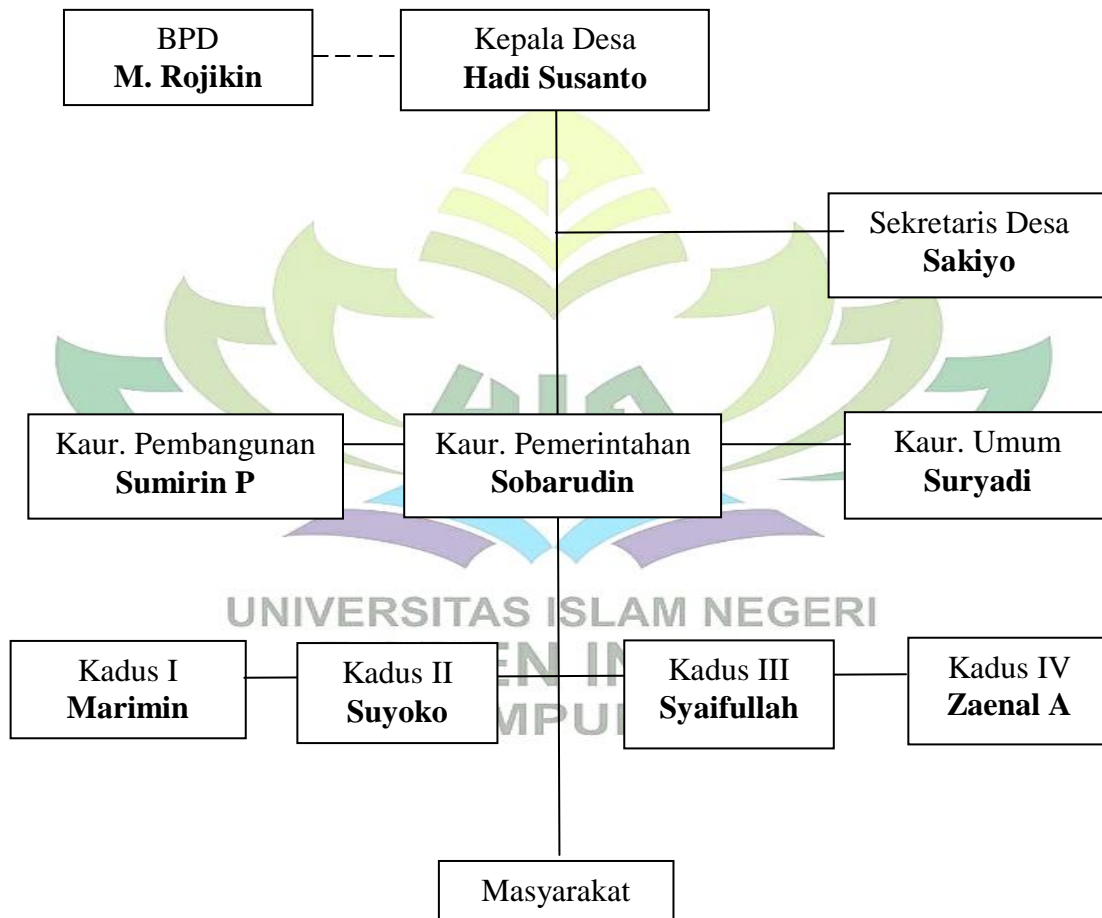
Dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi lain dalam bentuk yang sesederhanapun harus ada susunan organisasi dan harus ada pertanggung jawaban terhadap institusi di atasnya. Begitu pula dengan pemerintahan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Secara struktural, Kepala Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab terhadap pembangunan serta kemakmuran masyarakatnya. Bersamaan dengan itu untuk melaksanakan program pemerintahan maka ditetapkan adanya struktur pemerintahan desa. Dengan adanya struktur pemerintahan desa ini, maka semua aparat desa mengerti akan tugas dan kewajiban masing-masing yang harus dikerjakan, sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.⁷⁸

⁷⁷*Dokumentasi*, Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.

⁷⁸Hadi Susanto, Kepala Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, *Wawancara*, Mei 2017.

Adapun struktur pemerintahan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat beserta staf pendukung pelaksanaan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :



Keterangan : ——— Garis Instruksi
 Garis Koordinasi

Berdasarkan bagan tersebut di atas, Kepala Desa bertugas memperhatikan dan mengarahkan masyarakat serta menjadi motivator program kerja yang direncanakan dan dijadikan tujuan organisasi atau lembaga yang ada dan disesuaikan dengan keadaan desanya, sebagai desa

yang homogen agar dapat mengangkat citra desa dan supaya lebih maju dari sebelumnya.

Keadaan Penduduk

Penduduk berjumlah Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berjumlah 2.217 jiwa. Adapun perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam tingkatan umur sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4
Keadaan Jumlah Penduduk Desa Way Mengaku Balik Bukit
Menurut Jenis Kelamin dan Umur

No	C. Umur	Laki-laki	Perempuan	D. Jumlah
1	00-04	84	76	160
2	05-06	124	127	251
3	07-12	165	156	321
4	13-18	67	52	119
5	19-21	247	308	555
6	22-26	167	159	326
7	27-40	134	118	252
8	41-55	120	79	199
9	56-60	17	10	27
10	60 tahun ke atas	2	5	7
E. Jumlah		1.127	1.090	2.217

Sumber : Dokumentasi Desa Way Mengaku Tahun 2017

Keadaan Mata Pencaharian

Mengingat keadaan alam yang kaya akan potensi tanah yang subur, maka wilayah Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sangat cocok untuk dijadikan lahan ladang, sawah dan kebun, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani lading dan sawah, di samping itu ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, jasa, buruh dan lainnya. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Way Mengaku Balik Bukit
Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tani	1.560
2	Buruh	440
3	Dagang	155
4	Karyawan pemerintah/swasta	60
Jumlah		2.217

Sumber : Dokumentasi Desa Way Mengaku Tahun 2017

Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan itu seseorang ilmu pengetahuan untuk mempertahankan dan menjalankan roda kehidupan dunia. Pendidikan ini benar-benar-benar disadari pentingnya oleh penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sehingga

tingkat kesadaran ini yang memacu orang tua menyekolahkan anaknya sesuai dengan tingkat kesejahteraan orang tua dan kecerdasan anaknya.

Untuk jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Keadaan Penduduk Desa Way Mengaku Balik Bukit
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum sekolah	656
2	SD	975
3	SMP	366
4	SMA	200
5	PT	20
Jumlah		2.217

Sumber : Dokumentasi Way Mengaku tahun 2017

Masyarakat menyadari bahwa anak-anaknya adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan agama, maka mereka memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan formal baik yang ada di desa tersebut maupun yang berada di sekitarnya bahkan keluar daerah.

Keadaan Keagamaan

Adapun jumlah penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan agama seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 7
Keadaan Penduduk Desa Way Mengaku Balik Bukit

Menurut Agama

No	Agama yang Dianut	Jumlah
1	Islam	2.042
2	Kristen	37
3	Khatolik	49
4	Hindu	79
5	Budha	10
Jumlah		2.217

Sumber : Dokumentasi Desa Way Mengaku tahun 2017

Tabel di atas memperjelas bahwa mayoritas penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat memeluk agama Islam, kondisi tersebut sangat memungkinkan sekali untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan.

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan hasil penelitian melalui, interview, obeservasi dan dokumentasi, sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat secara garis besar terdiri dari 3 macam, diantaranya :

Sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri

Pertanian seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan pertanian dan mempunyai kemampuan untuk bertani, sehingga dalam mengelola lahan tersebut dilakukan dengan sendiri, begitu juga dengan modal biasanya permodalan dikeluarkan sendiri tanpa campur tangan dari orang lain dan hasil dari pertanian tersebut juga milik sendiri sepenuhnya.

Sistem bagi hasil

Sistem parohan (bagi hasil) adalah sistem pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan tanah dilakukan oleh pihak petani, dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian ketika panen. Dalam pengelolaan tanah, petani pengelola mempunyai hak untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk tanaman, melakukan pengairan, dan memanennya ketika sudah waktunya. Dalam masalah permodalan semua dibebankan pada pihak petani pengelola, untuk masalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Sistem buruh tani

Sistem buruh tani adalah sistem kerja sama dimana petani sebagai buruh tani, dan hanya berkewajiban serta bertanggung jawab atas pengelolaan tanah dengan mendapatkan upah tertentu yang sudah disepakati, sedangkan selebihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan seperti bibit, pupuk, penyediaan alat-alat pertanian, dan obat hama. Tidak jarang juga konsumsi untuk buruh tani disediakan oleh pemilik lahan.

Berdasarkan beberapa sistem yang ada tersebut di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, ada yang relevansi dengan sistem pertanian yang dijelaskan dalam Islam. Sistem peparohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem mukhabarah yang dijelaskan dalam Islam. Dalam hal ini, perlu kajian yang lebih mendalam tentang shahih atau fasid nya akad yang dilakukan.

Alasan sistem mukhabarah mempunyai relevansi dengan sistem peparohan yang dilakukan masyarakat tenggulun karena sistem tersebut dipraktikkan dengan kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak di mana pengelolaan tanah dilakukan oleh pihak petani, dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian ketika panen. Sistem bagi hasil yang dianggap sah adalah bibit, pupuk, tenaga kerja, alat-alat pertanian, pemeliharaan tanaman, dan pengairan semuanya dibebankan pada petani penggarap. Sedangkan pemilik lahan cuma menyediakan lahan, sehingga yang menjadi objek dari akad tersebut adalah manfaat dari jasa pengelola. Dalam sistem ini pemilik lahan hanya bermodalkan tanah, sedangkan yang lainnya dari pihak penggarap atau pengelola tanah. Maka sistem tersebut sesuai dengan konsep mukhabarah sistem seperti ini banyak digunakan di masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sistem buruh tani merupakan kerja sama, tetapi tidak bisa dikategorikan dalam kerja sama yang telah dijeaskan dalam Islam. Kerja sama yang dijelaskan dalam Islam ada imbalan bagi hasilnya yang telah disepakati ketika awal akad. Akan tetapi sistem buruh tani di masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini tidak adanya kesepakatan bagi hasil hanya saja buruh tani tersebut mendapat imbalan upah sesuai kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Perjanjian parohan di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dapat ditemukan beberapa unsur, diantaranya :

1. Adanya kesepakatan para pihak

2. Izin menggarap dari pemilik tanah
3. Atas dasar kepercayaan

Bagi hasil kadang berfungsi sebagai menjaga tali kekerabatan sanak saudara. Dalam perjanjian bagi hasil tersebut hubungan keluarga diprioritaskan untuk diberi tawaran menggarap tanah, jika tidak ada sanak saudara yang bersedia menggarap tanah tersebut, penawaran baru diberikan kepada pihak lain yang bersedia untuk mengelola tanah tersebut.

Analisis Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Pertanian Hasil antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam

Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak, baik tokoh masyarakat, pemilik tanah, ataupun pihak penggarap. Dimana pengetahuan masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tentang bagi hasil pertanian dalam konsep Islam sangat minim, seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak keseluruhannya tahu, tidak keseluruhan petani mengetahui tentang konsep Islam, namun juga “sebagian ada yang mengetahui juga, namun sementara yang dipakai ini adalah adat, jadi adat kebiasaan pertanian yang ada disini yang dipakai, tidak memakai yang menganut konsep Islam sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Way

Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat umumnya berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang bagi hasil dalam konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat perjanjian bagi hasil ini dibuat berdasarkan hukum atau adat kebiasaan setempat. Karena, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya bagi hasil dalam konsep Islam. Ini juga sangat mempengaruhi hal tersebut tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan yang dirasa lebih fleksibel oleh masyarakat dalam menentukan bagaimana mekanisme mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Faktor ketidaktahuan terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku di masyarakat desa ini yaitu dengan cara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan. Meskipun sebagian masyarakat juga sudah mengetahui adanya aturan hukum dalam Islam tentang perjanjian bagi hasil, mereka tetap cenderung memilih melaksanakan dengan dasar imbalan pembagian hasil sesuai dengan hasil panen yang didapatkan petani penggarap. Alasannya adalah karena sudah dilakukan secara turun menurun, saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam melakukan akad mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan mengucapkan kata sepakat antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan dalam masalah akad masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan

Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa. Tapi di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini jarang sekali adanya perselisihan dalam berakad, karena didasari dengan saling rela dan ikhlas dengan keputusan yang ada ketika akad.

Kata sepakat dalam akad

Bagi masyarakat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (mufakat). Pada praktiknya masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat mengerjakan tanah milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya mendasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Tidak sedikit masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pertanian untuk mengelola lahannya dengan menggunakan sistem parohan dengan pembagian bagi hasil.

Secara hukum dilihat dari usia masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang telah melakukan praktik kerja sama bagi hasil dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan akad telah cakap dalam melakukan hukum. Jadi jika terjadi wanprestasi maka kedua belah pihak yang melakukan akad bisa mempertanggungjawabkan atau bisa diminta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini. Dapat

diambil kesimpulan bahwa kontrak yang dilakukan telah sah dan memenuhi syarat, sebagaimana yang melakukan akad tersebut adalah orang dewasa dan telah cakap hukum.

Bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan secara tidak tertulis atau cukup dengan lisan antara kedua belah pihak, dengan beberapa alasan yang mendasarinya berikut :

- a. Mudah pelaksanaannya dan tidak berbelit-belit
- b. Adanya saling percaya

Menurut konsep Islam, bentuk perjanjian bagi hasil pertanian ini tidak harus dengan hitam diatas putih, yakni dengan secara tertulis. Akan tetapi, menurut jumhur ulama dengan melakukan ijab dan qabul sudah memenuhi rukunnya, baik qabul tersebut berupa ucapan ataupun langsung dengan tindakan. Dalam hal bentuk perjanjian ini, masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Mengenai pedoman yang dirujuk dalam melakukan kerja sama bagi hasil, masyarakat tidak mengacu pada Undang-undang, tidak juga mengacu pada konsep Islam akan tetapi dalam pratiknya mempunyai prinsip saling menguntungkan, seperti halnya yang dikatakan oleh penggarap sawah, pihak pemilik sawah bisa mengambil keuntungan dari hasil pertanian tersebut, pihak

penggarap juga ada keuntungan karena mempunyai lahan yang bisa dikerjakan. Berdasarkan ayat alqura'an : *wata'awanu 'alal birri wattaqwa walaa ta'aawanuu 'alal istmi wal 'udwaan.*

Ketentuan porsi bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat ternyata tidak ada ketentuan di awal akad, yang ada antara kedua belah pihak pasrah dengan hasil yang didapatkan ketika panen nanti, berapapun hasilnya saling terima. Jadi pembagiannya terserah penggarapnya memberikan bagian berapa. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik lahan “tergantung panen yang dihasilkan. Mendapatkan bagian banyak ataupun sedikit kita sebagai pemilik sawah harus bisa terima apa adanya, kasihan pihak penggarap juga, mengelola lahan juga tidak gampang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit”.

Dapat diambil kesimpulan, dalam penentuan porsi bagi hasil ini masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana dalam ketentuan Islam dijelaskan, bahwa porsi bagi hasil harus dijelaskan pada saat awal dilaksanakan akad.

Apabila diantara kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerja sama, maka dalam masalah pengelolaan lahan tersebut adalah murni 100 % dari pihak penggarap, jadi pihak pemilik lahan sudah tidak tahu-menahu lahannya dikelola seperti apa, Jadi semuanya diserahkan sepenuhnya atau dikelola sepenuhnya oleh pihak penggarap. Dalam hal ini, praktik yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tanah yang sudah

diserahkan kepada pihak penggarap maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penggarap tidak boleh ada campur tangan dari pemilik tanah.

Lamanya waktu perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada sebagian yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerja sama tersebut. Hal ini terjadi berdasarkan alasan dilakukannya kerja sama bagi hasil dikarenakan banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan diluar atau lebih tepatnya merantau ke luar negeri, sehingga tidak adanya kemampuan pemilik tanah dalam mengelola lahannya sendiri menjadikan tidak adanya batasan waktu yang ditentukan dalam pengelolaan tanah, selama penggarap masih sanggup mengelola tanah dan pemilik tanah belum kembali ke tempat asalnya maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada ketentuan waktu berapa lama kesepakatan kerja sama akan terus berlangsung dan model perjanjian tersebut sudah berjalan begitu saja sampai saat ini. Pemilik tanah juga berfikir bagaimana caranya tanah yang dimilikinya tidak terlantar dan bisa diambil kemanfaatannya maka pemilik tanah dengan senang hati melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil apabila ada penggarap yang bersedia mengelola tanah tersebut, bahkan tidak jarang pemilik tanah tidak mendapatkan porsi bagi hasil ketika penggarap mendapatkan panen.

Kejadian seperti ini terjadi karena rasa suka rela dan terima kasih dari pemilik tanah kepada penggarap yang telah bersedia mengelola tanah tersebut. Sedangkan sebagian yang menentukan waktu dalam perjanjian kerja sama, masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menentukan waktu berkisar antara 1-2 Tahun. Perjanjian yang seperti ini dilakukan oleh pemilik tanah yang memiliki lahan kosong tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya, sehingga batas waktu yang diberikan kepada penggarap tersebut habis ketika pihak penggarap sudah menghasilkan panen, apabila pemilik tanah ingin melanjutkan perjanjian kerja sama tersebut maka dibuatnya akad baru (adanya musyawarah bersama) lagi. Namun, jika ketentuan waktu yang diperjanjikan sudah habis, akan tetapi petani penggarap belum menghasilkan panen, maka pihak yang berakad masih melanjutkan perjanjian tersebut sampai menghasilkan panen. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pihak penggarap sawah “langkah yang diambil yaitu memperbarui akad lagi kalau sudah habis waktunya, kalau memang waktu yang disepakati sudah habis maka ada kesepakatan baru lagi. Ketika ditengah perjanjian waktu yang ditentukan sudah habis tetapi belum menghasilkan panen maka akad tersebut masih berlaku.

Berlanjut sampai panen

Ini sudah sesuai dengan konsep Islam, dimana apabila waktu yang disepakati sudah habis, tapi belum menghasilkan panen maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut sampai pihak penggarap menghasilkan panen.

Berdasarkan data tersebut adanya ketidaksesuaian antara realita perjanjian bagi hasil dengan teori yang dijelaskan menurut Islam. Dimana dalam Islam dijelaskan masa berlaku akad bagi hasil dalam pertanian disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui ketika awal akad. Sedangkan adat masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak demikian, kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika di awal akad, hal ini mengandung unsur *gharar* sedangkan *gharar* juga dilarang dalam Islam *urf* tersebut sudah melekat di masyarakat, akan tetapi '*urf*' yang terjadi ini merupakan '*urf*' fasidah karena bertentangan dengan nash yang ada sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hukum.

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu karena sudah berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah yang sudah ditentukan, dan berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik tanah dan penggarap karena sebab atau alasan tertentu. Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan berakhir, para pihak yang berakad menggunakan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatakan berakhir maka diikuti dengan pengembalian tanah kepada pihak pemilik tanah.

Hasil penelitian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, pada umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat (kebiasaan setempat secara turun temurun). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan konsep Islam bagi hasil di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak bisa diterapkan atau tidak dapat terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena :

- a. Kebanyakan masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak mengetahui adanya konsep Islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang perjanjian bagi hasil, termasuk kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian.
- b. Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa dilakukan dalam praktik perjanjian bagi hasil.

Dari penjelasan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, perjanjian bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang telah ada, Akan tetapi masyarakat mengacu pada adat yang sudah melekat, dengan mengacu adat bukan berarti menyimpang dari ketentuan Islam yang ada.

Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka kerja sama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum.

Akan tetapi adat yang berlaku di masyarakat ini belum sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan patokan sebagai hukum yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana dalam Islam telah dijelaskan adat atau 'urf bisa dijadikan hukum apabila tidak melanggar dengan ketentuan nash dan bisa mendatangkan kemaslahatan.

Aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian

Bagi hasil merupakan salah satu komponen dalam rangka pembaharuan Agraria yang sesungguhnya memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat pertanian, namun selama ini hampir tidak diperhatikan.

Dalam konsep Islam telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan diawal akad, dan pembagian hasil panen juga harus dijelaskan diawal akad.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, hal yang mendorong masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat melakukan sistem transaksi pengolahan tanah melalui sistem perjanjian bagi hasil yang mendasarkan pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masarakat yang sudah terbiasa melaksanakan kerja sama dengan cara seperti itu. selain sudah kebiasaan kerja sama yang dilakukan sesuai dengan adat juga bisa memberikan rasa nyaman

antara kedua belah pihak yang berakad. Masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat juga lebih memilih menggunakan sistem hukum adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut konsep Islam dengan alasan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

1. Kebiasaan yang sudah turun temurun
2. Adanya kerja sama yang bersifat gotong royong

Sistem bagi hasil yang dilakukan dalam perjanjian ini digunakan sebagai sampingan dengan menggunakan perbandingan yang tidak disepakati ketika awal akad. Karena petani penggarap merasa bahwa keuntungan yang didapat seimbang dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah. Kemudian tingkat resiko apabila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk dalam kerja sama pertanian ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak penggarap. Sehingga menurut masyarakat di tempat lokasi penelitian banyak yang menyatakan pihak penggarap merasa dirugikan akan tetapi dalam penyelesaiannya masih dimusyawarahkan bersama.

Dilihat dari kasat mata, praktek kerja sama tersebut ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak pemilik tanah, dimana dalam pembagian hasil panen tidak adanya kejelasan berapa porsi yang akan didapatkan, karena dalam pembagiannya menyesuaikan berapa hasil panen yang nanti didapatkan oleh pihak penggarap. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, diantara kedua belah pihak yang berakad ternyata tidak ada yang dirugikan, karena semua modal yang dikeluarkan

untuk pengolahan tersebut dari pihak petani penggarap dan pembagian hasil panen juga tergantung panen yang didapatkan. Jika petani penggarap menghasilkan panen yang banyak maka pemilik tanah juga mendapatkan bagian banyak begitu sebaliknya. Namun jika pemilik tanah mendapatkan bagian banyak tetapi petani penggarap mendapatkan hasil panen yang sedikit maka kebanyakan masyarakat tidak bersedia untuk melanjutkan kerja sama tersebut. Walaupun hasil panen yang didapatkan sedikit maka ada pihak yang merasa rugi yaitu pihak petani, karena pihak petani sudah mengeluarkan banyak biaya tapi tidak mendapatkan hasil panen. Sementara kedua belah pihak yang berakad kebanyakan sudah saling mengetahui, saling mengerti, dan saling tenggang rasa. Jadi kalau masalah pembagian hasil pemilik tanah sudah memaklumi, sehingga tidak ada pihak yang berebutan bagi pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah.

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa aspek keadilan yang terjadi pada praktek bagi hasil di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini tidak terlalu nampak. Karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti, dan saling tenggang rasa. Namun, dalam pembagian porsi bagi hasil tersebut adanya ketidakjelasan atau dalam istilah Islam disebut gharar, dimana tidak ada ketentuan porsi yang dijelaskan ketika awal akad. Sehingga tidak sesuai dengan konsep Islam yang ada. Dengan tidak adanya kesepakatan nisbah bagi hasil di awal akad, ini menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian, dan hal ini sudah menjadi '*urf*' atau kebiasaan yang

melekat pada masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sehingga dalam hal ini *'urf* yang biasa terjadi di kalangan masyarakat tersebut telah menyimpang dari konsep Islam yang ada, dimana dalam konsep Islam dijelaskan bahwa *'urf* yang bisa dijadikan hukum yaitu *'urf* yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam, sedangkan dalam pembagian porsi bagi hasil tersebut adanya unsur gharar, dan gharar gharar dilarang dalam Islam. Jadi dalam pembagian porsi yang tidak dijelaskan di awal akad ini tidak sesuai dengan Islam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan mengacu kepada rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 3 macam yaitu 1) sistem pemilikan lahan dan dikerjakan sendiri, 2) sistem bagi hasil (parohan), dan 3) sistem buruh tani. Dari ketiga sistem tersebut ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang dijelaskan dalam Islam, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada relevansinya dengan sistem mukhabarah karena semua modal pengelolaan tanah dibebankan kepada pihak penggarap.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan konsep Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan *sighat*. Hanya saja dari aspek objek akad adanya ketidaksesuaian yaitu presentase porsi bagi hasil dan jangka waktu tidak disebutkan pemilik modal dan pekerja ketika di awal akad.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada kedua belah pihak yang berakad hendaklah menentukan bagian masing-masing di awal akad dengan pasti dan tertulis supaya tidak merugikan salah satu pihak.
2. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian ditanggung bersama antara pemilik dengan penggarap.
3. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil, hendaklah menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
4. Dari hasil penelitian ini, masih dibutuhkan peneliti lanjutan. Dalam melakukan penelitian seharusnya lebih teliti dalam melakukan penelitian. Peneliti selanjutnya selain meneliti dari segi konsep Islamnya sebaiknya dikombinasikan dengan peraturan undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Ali, Islam dan Problematika Kemiskinan, *Majalah Pesantren*, No. 2/Vol. III, 1986.
- Abul A'la Al Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (Bandung: Al Maarif, Bandung, 1984), Penerjemah Abdullah Suhaili.
- AE. Priyono, dkk., *Islamisasi Ekonomi : Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: PLP2M, 1995).
- Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), cet. keempat.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ahmad Sukarja, *Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan*, (Jakarta: LSIK, 1995).
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet. Ke-2.
- Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), Cet. ke-2.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005).
- Erni Susana, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, (Malang: Universitas Merdeka Malang: Jurnal Keunagan dan Perbankan, Vol.15, No.3, September 2011).
- Euis Amalia, *Prinsip Dasar Investasi Syari'ah dan Berbagai Produk yang Dikembangkan*, (Jakarta: P3EI, UIN Syaraif Hidayatullah, 2002).

- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002).
- Hidajat Nataatmadja, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik*, (Yogyakarta: PLP2M, 2004).
- Himawan Y.W, <http://himawayanuw.blogspot.co.id>, *Pengertian-Muzaraah-Dilihat-Dari-Seg*, diakses Juli 2017.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2011).
- Izzudin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahari Aneska, 2002), cet.II
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004), edisi revisi keempat.
- Jusuf Sutanto, dkk., *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*, (Jakarta: Kompas, 2006).
- Karnaen Perwata Atmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002).
- Kartasapoetra dan Agus Rahmat, *Ilmu ekonomi umum*, (Bandung: Armico 1982).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 2006), Cet. ke v.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. vi.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).
- Malik Fadjjar, *Kemiskinan Dalam Perspektif Islam, dalam Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI, 1998).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet.ke-5.
- Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, “al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab”, dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000).

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syarriah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011).

Rusjdi Rasjidin, (Et. Al.), *Pengantar Ekonomi Modern*, (Jakarta: Yudistira, 1996).

Soekartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2001), cet.VI.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cetakan keenam.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1996).

Tantowi Jauhari, *Dakwah dan Persoalan Kemiskinan*, (Bandar Lampung: Mufida, 1998).

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Lampiran 1

KERANGKA OBSERVASI

No	Perihal	Keterangan
1	Pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam2. Kata sepakat dalam akad3. Bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil4. Lamanya waktu perjanjian5. Aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Lampiran 2

KERANGKA INTERVIEW

DENGAN MASYARAKAT DESA WAY MENGAKU

1. Bagaimana pemahaman atau pengetahuan bapak/ibu tentang bagi hasil dalam konsep Islam?
2. Bagaimana bentuk akad perjanjian kerja sama bagi hasil antara bapak dengan pemilik model ?
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil antara bapak dengan pemilik model ?
4. Berapa lama waktu perjanjian kerja sama bagi hasil antara bapak dengan pemilik model ?
5. Apakah bapak merasakan keadilan dalam perjanjian bagi hasil antara bapak dengan pemilik model ?

Lampiran 3

F. KERANGKA INTERVIEW

G. DENGAN KEPALA DESA

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?.
2. Bagaimana susunan pemerintahan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?.
3. Bagaimana keadaan penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?.
4. Bagaimana keadaan mata pencaharian Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?.
5. Bagaimana keadaan pendidikan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?
6. Bagaimana keadaan keagamaan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?.

H. Lampiran 4

I. KERANGKA DOKUMENTASI

J. No	K. Perihal	L. Keterangan
M. 1	Sejarah desa	
2	Susunan pemerintahan	
3	Keadaan penduduk	
4	Keadaaan pendidikan	
5	Keadaan mata pencaharian	
6	Keadaan ekonomi	
7	Keadaan keagamaan	

N.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Lampiran 5

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No	Nama	Dusun	Umur	Pendidikan
1.	Imanudin	I	45	SMP
2.	Suhadi Ali	I	34	SMA
3.	Nur Rohman	I	41	D2
4.	Nur Kholid	I	33	SMP
5.	Ahmad Sumarno	I	37	SD
6.	Saparun	II	43	SMA
7.	Umar Hadi	II	46	SMP
8.	Muh.Robani	II	37	SMA
9.	Sumbani Zamani	II	35	S1
10.	Suharso	II	40	SMP
11.	Ahmad Bistri	II	36	S1
12.	Fuadi Ramli	III	49	SMP
13.	Muhammad Dahar	III	36	SMA
14.	Ali Mufid	III	49	SMA
15.	Bambang Waluyo	III	33	D2
16.	Syahrul Saputra	III	45	SMA
17.	Imanudin	IV	37	D2
18.	Ahmad Syahputra	IV	42	SMA
19.	Budi Santoso	IV	48	SMA
20.	Tino Hartoyo	IV	38	SMK
21.	Muhammad Muslim	IV	42	SMA